

BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji strategi komunikasi politik calon gubernur dan wakil gubernur Jabar periode 2013-2018 yang direalisasikan dengan tindak tutur dan kesantunannya sebagai upaya penyelamatan wajah. Pada bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi operasional.

1.1 Latar Belakang Masalah

Kampanye politik dapat diartikan pula sebagai bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat (Arifin, 2003:25). Dari sudut pandang linguistik kampanye-kampanye politik sangat menarik untuk diamati, karena aktivitas tersebut memperlihatkan bentuk bahasa yang dimanfaatkan sedemikian rupa untuk tujuan yang jelas dan terpusat. Tujuan-tujuan persuasi ditempuh dengan berbagai cara, dari kampanye yang bersifat negatif sampai kampanye yang bersifat positif. Kampanye negatif ditempuh para politikus untuk menyerang lawan politiknya dengan membeberkan kejelekan-kejelekannya. Sementara, kampanye positif adalah “menjual” keunggulan-keunggulannya (Orwell, 1986:60).

Politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk kegiatan yang menunjang keberlangsungan kehidupan politik adalah pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan secara nasional yaitu pemilihan presiden (pilpres), atau secara regional yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada), baik daerah tingkat satu maupun daerah tingkat dua. Sebagai bentuk keikutsertaan dalam kehidupan politik, masyarakat Jawa Barat

melaksanakan pilkada pada tanggal 24 Februari 2013. Pada tahapan akhir pilkada tersebut, dikukuhkan gubernur dan wakilnya untuk masa periode 2013-2018.

Penyampaian pesan politik melalui media massa merupakan bentuk kampanye yang handal dalam hal menjangkau khalayak luas. Kampanye politik saat ini sudah mengadopsi prinsip-prinsip pemasaran dan pembentukan citra. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena perubahan sistematika pemilihan kepala daerah dari yang sebelumnya dipilih oleh legislatif menjadi dipilih langsung oleh masyarakat. Menurut Ruslan (2005:35), kampanye politik merupakan jenis kampanye yang pada umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum.

Komunikasi politik memfokuskan pada kegunaannya yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Bahwa komunikasi politik tidak hanya menitikberatkan pada penerimaan norma politik dan tingkah laku pada sistem politik yang sedang berlangsung, tetapi juga pada bagaimana mewariskan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Artinya sisi komunikasi sangat dipentingkan dalam proses pewarisan tersebut.

Dengan demikian, komunikasi politik harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi efektif, atau dengan kata lain dibutuhkan ragam politik yang memiliki ciri yang berbeda dengan ragam biasa. Tampubolon (1999:2) menyebutkan bahwa ragam politik adalah bahasa dalam fungsi politik, sehingga dalam ilmu politik ragam politik disebut sebagai bahasa politik (*language of politics*). Bila dihubungkan dengan pengelolaan kekuasaan atas rakyat dan negara, maka bahasa politik juga disebut sebagai bahasa kekuasaan *language power* (Laswel,1965:3). Dalam hal ini bahasa adalah alat kekuasaan yang digunakan

bukan sekedar untuk mempengaruhi tetapi juga untuk membentuk opini dan perasaan masyarakat. Sebaliknya bahasa juga digunakan rakyat untuk “menguasai para penguasa”, sehingga berfungsi ganda yaitu untuk mempengaruhi penguasa dan menguasai.

Arifin (2003:68) menerangkan bahwa salah satu jenis kampanye politik adalah kampanye massa, yaitu kampanye politik yang ditujukan kepada khalayak umum, baik melalui hubungan tatap muka maupun dengan menggunakan berbagai media, seperti surat kabar, radio, televisi, film, spanduk, baligo, poster, folder dan selebaran serta medium interaktif melalui komputer (internet). Penyampaian pesan politik melalui media massa merupakan jenis kampanye yang handal dalam hal menjangkau khalayak luas. Oleh karena itu, dipilihlah forum debat kandidat yang disiarkan di televisi sebagai salah satu bentuk kampanye resmi bagi para kandidat.

Forum debat kandidat atau dialog kandidat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas kandidat, karena dalam forum ini para kandidat akan menjelaskan latar belakang pencalonan serta agenda yang akan dilakukan seandainya terpilih. Para kandidat dapat pula meyakinkan rakyat dengan pikiran-pikiran konstruktif dan kritis. Masyarakat secara bebas dan demokratis akan mengetahui agenda yang ditawarkan para kandidat. Para kandidat pun dituntut bersaing dengan program dan visi-misi yang jelas dengan yang ditawarkan kandidat lain secara sehat.

Debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Jabar tersebut disiarkan oleh salah satu stasiun televisi nasional pada tanggal 20 Februari 2013. Debat ini terdiri atas empat sesi, yaitu sesi 01 pemaparan visi-misi, sesi 02 uji kandidat oleh para panelis. Kemudian pada sesi 03 acara debat dengan cara para kandidat diuji oleh kandidat lainnya. Sesi terakhir adalah sesi orasi para kandidat untuk mendapatkan dukungan dan meyakinkan para calon pemilih.

Kegiatan pilkada Jabar yang persiapannya sudah dimulai sejak tahun 2012 tersebut diikuti oleh ada lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan kandidat pertama adalah pasangan dari tim independen. Kemudian pasangan kedua dari Partai Golkar. Diikuti pasangan ketiga dari Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKB. Pasangan keempat didukung oleh Partai PKS, PPP, PBB dan Hanura. Pasangan kelima dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada forum debat kandidat, kelima pasangan tentu harus menggunakan bahasa dengan baik dan lugas. Konteks bahasa apa yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini tentu sangat diperhitungkan.

Untuk menarik dukungan massa agar memilihnya, seorang kandidat harus menggunakan strategi. Hal pertama yaitu visi-misi. Seorang kandidat harus memiliki visi-misi berisi program-program kerja yang akan dilakukan selama kepemimpinannya. Program-program kerja yang tertuang dalam visi-misi tersebut harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Forum debat ini merupakan salah satu momen terbaik dalam penyampaian visi-misi para kandidat. Para kandidat dituntut untuk menggunakan berbagai strategi komunikasi. Strategi komunikasi tersebut dapat dilihat dari realisasi tindak tutur antar-kandidat tersebut pada forum debat kadidat. Austin (1962:8) mengemukakan bahwa mengujarkan sebuah kalimat tertentu dapat dipandang sebagai melakukan tindakan (*act*), selain memang mengucapkan kalimat tersebut. Searle (1979:2) mengklasifikasikan tindak tutur ke dalam lima kategori berdasarkan pada jenis dan hakikat tindakan yang dilakukan penutur, yaitu 1) asertif (mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkan), 2) direktif (meminta orang lain untuk melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan), 3) ekspresif (evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu), 4) komisif (mengikat penuturnya untuk melakukan apa yang disebutkan di dalam tuturannya), dan 5) deklaratif (menciptakan hal status, keadaan, dan sebagainya yang baru). Hal yang paling menarik dari kajian tindak tutur ini adalah bahwa satu tindak tutur ternyata dapat

memiliki bentuk-bentuk tuturan yang mencerminkan maksud dan fungsi komunikasi yang bermacam-macam.

Selain visi-misi, dalam situasi persaingan antar-kandidat, para kandidat harus bisa menciptakan citra diri yang baik. Selama forum debat kandidat, citra diri kandidat tidak hanya dilihat dari sikap diri (gestur), namun juga dari penggunaan bahasa. Citra diri pun harus dibangun oleh para kandidat dengan menunjukkan kesantunan berbahasa mereka. Kesantunan itu penting dalam penyelamatan wajah mereka sendiri maupun lawan politiknya. Kandidat yang dapat menjaga wajah dirinya dan wajah kandidat lainnya akan mendapat citra baik di mata masyarakat pemilih.

Konteks situasi bisa mengubah cara berbahasa seorang politisi, begitu pun para kandidat ini. Dalam interaksi politik, bahasa mengemban fungsi sebagai wahana penyampai kebijaksanaan, memperoleh penghargaan, dan untuk meyakinkan. Para politisi memanipulasi bahasa untuk membentuk pola pikir masyarakat/orang-orang. Hal ini ditujukan untuk membuat kebohongan-kebohongan tampak menjadi sebuah kejujuran dan membunuh/merusak dengan terhormat dan menampilkan sebuah kekerasan menjadi angin segar (Orwel, 1986:157). Dengan demikian bahwa para politisi menggunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan pendapatnya, melainkan untuk menyembunyikannya. Hal itu karena dibalik pikiran terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dipertahankan. Untuk menyembunyikan pikiran-pikiran politik tersebut, bahasa politik harus ditata sedemikian rupa karena dalam struktur linguistiknya penuh dengan muatan kekuasaan yang tersembunyi.

Dalam teori kesantunan berbahasa, ada tindak-tanduk tutur tertentu yang dapat mengancam wajah dirinya atau wajah orang lain. Brown dan Levinson (1987:62) mengungkapkan bahwa wajah merupakan atribut pribadi yang ada pada semua masyarakat dan bersifat universal. Setiap orang memiliki dua wajah atau keinginan yaitu wajah/keinginan positif serta wajah/keinginan negatif. Wajah

positif merupakan keinginan individu untuk diakui secara sosial, sedangkan wajah negatif mengacu pada keinginan individu untuk tidak diganggu dan bebas dari imposisi. Setiap orang memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk memuliakan wajahnya sendiri dan juga wajah anggota masyarakat lainnya (Aziz 2008:13).

Brown & Levinson (dalam Nadar,2009:32-34) menerangkan bahwa tindakan yang berpotensi melanggar wajah negatif meliputi yang terkandung dalam:

- a. tindak tutur direktif, seperti memerintah dan meminta, menyarankan, menasehati, memperingati, mengancam, menantang,
- b. tindak tutur komisif, seperti menawarkan dan menjanjikan, dan
- c. tindak tutur ekspresif, seperti memuji atau ungkapan-ungkapan perasaan negatif (kebencian dan kemarahan).

Kemudian, tindakan yang mengancam wajah positif didominasi oleh tuturan asertif, seperti menyangkal, menyakatan ketidaksetujuan, mengkritik, merendahkan, mempermalukan, mengeluh, memarahi, mendakwa, mengancam, menakuti, dan menentang. Oleh karena itu, agar tindak tutur yang diungkapkan tidak melanggar kesantunan, baik wajah negatif atau pun positif, para kandidat menggunakan strategi kesantunan.

Dari penjabaran fenomena tersebut, penting kiranya membahas bagaimana sebuah bahasa digunakan dalam interaksi politik. Pemahaman terhadap strategi komunikasi politik antar-kandidat yang tercermin dalam realisasi tidak tutur dan upaya pencitraan diri yang tercermin dalam penggunaan strategi kesantunannya.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan yang dikaji dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana realisasi tindak tutur para kandidat pasangan calon gubernur Jabar periode 2013-2018 pada forum debat kandidat?

Hedi Setiadi, 2015
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK
PARA CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Bagaimana realisasi kesantunan para kandidat pasangan calon gubernur Jabar periode 2013-2018 pada forum debat kandidat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan strategi komunikasi politik yang direalisasikan dengan tindak tutur dan kesantunannya sebagai upaya penyelamatan wajah. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan utama tersebut dijabarkan menjadi beberapa tujuan, yaitu:

1. mendeskripsikan realisasi tindak tutur para kandidat pasangan calon gubernur Jabar periode 2013-2018 pada forum debat kandidat,
2. menganalisis realisasi kesantunan para kandidat pasangan calon gubernur Jabar periode 2013-2018 pada forum debat kandidat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut.

1. Memberikan gambaran secara umum tentang berbagai tindak tutur dan kesantunan berbahasa politisi Indonesia. Berikutnya, dengan sudah hadirnya era reformasi dan demokratisasi dapat dipahami penanda kesantunan berbahasa para politisi, dan secara umum dapat diketahui mengapa suatu tuturan bisa dikatakan santun dan tuturan yang lain tidak santun.
2. Memberikan pemahaman tentang tindak tutur dan kesantunan berbahasa politisi dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dalam berkomunikasi kampanye politiknya, karena mempunyai cara-cara tertentu yang mereka anggap santun untuk menyampaikan gagasan mereka.
3. Memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan kepada peneliti-peneliti lainnya yang ingin menganalisis tentang tindak tutur dan kesantunan berbahasa kampanye politik dan dalam

cakupan yang lebih luas memberikan sumbangan pikiran untuk pengajaran Pragmatik Indonesia.

4. Menambah khazanah kepustakaan atau bahan literatur dalam bidang linguistik khususnya pragmatik.

1.5 Definisi Operasional

Untuk dapat memahami cakupan analisis data dan pembahasannya, berikut ini merupakan penjabaran mengenai definisi operasional.

1. Kampanye dalam penelitian ini merupakan acara debat kandidat yang disiarkan secara langsung oleh sebuah stasiun televisi swasta nasional pada tanggal 20 Februari 2013. Acara ini dibagi menjadi empat sesi, yaitu sesi 01 pemaparan visi-misi, sesi 02 uji kandidat oleh para panelis, sesi 03 debat antar kandidat, dan sesi 04 orasi para kandidat untuk mendapatkan dukungan dan meyakinkan para calon pemilih.
2. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Partai politik perlu menerjemahkan informasi yang mudah dipahami oleh pemerintah dan masyarakat, agar komunikasi bersifat efektif (Cholisin, 2007:114). Komunikasi politik menjadi posisi penting terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang dapat memfungsikan kekuasaan. Proses ini berlangsung disemua tingkat masyarakat dan setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi diantara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya bahkan diantara anggota masyarakat dengan para penguasanya.
3. Debat yang memiliki arti berpegang teguh pada argumen tertentu dalam strategi bertengkar atau beradu pendapat untuk saling mengalahkan atau memenangkan lidah. Jadi, definisi debat sendiri adalah suatu cara untuk menyampaikan ide secara logika dalam bentuk argumen disertai bukti–bukti

yang mendukung kasus dari masing-masing pihak yang berdebat. Secara umum debat sendiri dapat dilakukan dengan cara berkelompok, yaitu ada dua pihak yang di sini masing-masing memegang peranan sebagai pihak positif dan negatif. Selain itu, mereka mencoba mempertahankan argumen mereka dengan di dukung oleh bukti-bukti serta fakta-fakta yang mendukung kasus mereka dan juga untuk mempertahankan serta menyerang mitra tutur dalam program-program kerja serta visi-misi para kandidat.

4. Tindak tutur yang digunakan dalam penelitian ini adalah tindak tutur berdasarkan teori Austin. Dalam teorinya, Austin mengklasifikasikan daya yang terdapat dalam ujaran menjadi tiga, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kemudian, Searle mengembangkan tindak tutur ilokusi tersebut dengan mengklasifikasikannya dalam lima jenis, yaitu asertif, direktif, eskpresif, komisif, dan deklaratif.
5. Kesantunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi-strategi kesantunan yang digunakan oleh Brown & Levinson (B&L). Brown & Levinson (dalam Grundy, 2008:199) menyatakan bahwa untuk mempertahankan kesantunan, seseorang dapat menggunakan 4 strategi kesantunan, yaitu strategi langsung tanpa basa-basi (*bald on-record strategy*), strategi kesantunan negatif (*negative politeness strategy*), strategi kesantunan positif (*positive politeness strategy*), dan strategi tidak langsung (*off-record strategy*). Namun, strategi yang digunakan pada penelitian ini adalah strategi kesantunan positif dan strategi kesantunan negatif. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini bisa fokus dan lebih cocok dengan data yang ada serta akan lebih mendalam. Selain itu juga karena kedua strategi ini memiliki keunikan dan keberagaman strategi yang terdiri dari sub-sub strategi yang sangat menarik untuk diteliti. Tuturan yang cenderung merupakan tindakan yang tidak menyenangkan yang disebut *face threatening act* (FTA) Tindakan yang mengancam tersebut dapat mengarah pada ancaman wajah negatif dan

wajah positif. Tindakan yang mengancam wajah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tindakan yang mengancam wajah positif lawan tutur, dan tindakan yang mengancam wajah negatif lawan tutur. Karena pada dasarnya kesantunan positif ditujukan terhadap wajah positif lawan tutur, yaitu citra positif yang dianggap dimiliki oleh lawan tutur. Sedangkan kesantunan negatif pada dasarnya ditujukan terhadap bagaimana memenuhi dan atau menyelamatkan sebagian wajah negatif lawan tutur, yaitu keinginan dasar lawan tutur untuk mempertahankan apa yang dianggap sebagai wilayah dan keyakinan dirinya. Sehingga, *redressive actions* dapat berbentuk kesantunan positif atau kesantunan negatif. Dengan demikian penelitian mengenai strategi komunikasi politik pada forum debat kandidat ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan dua strategi ini.